

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Visum et Repertum (VeR)

1. Pengertian Visum et Repertum (VeR)

Visum et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Penegak hukum mengartikan *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang wajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Dengan adanya ketentuan ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang sah untuk kepentingan membuat VeR, biar lafal dan maksudnya berbeda. *Visum et Repertum* (VeR) adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu

berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa).

7

Pengertian yang terkandung dalam *visum et repertum* ialah "yang dilihat dan yang ditemukan". Jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Hal tersebut merupakan kesaksian tertulis.

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, *visum et repertum* merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti*.⁸

Dengan berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *visum et repertum* sangat penting bagi penyidikan suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan. Seperti halnya dalam kasus yang terjadi di Blitar tahun 2016. Dalam kasus tersebut pihakpenyidik melakukan visum dikarenakan menurutnya kematian dari Nurhadi itu tidak wajar. Pembongkaran mayat bapak satu anak ini

⁷ Njowito hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 23

⁸ Atang Ranoemihardjo. 1983. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Edisi Kedua. Bandung: Taristo. Hal. 44

dilakukan Polres Blitar, untuk kepentingan otopsi. Sebab kakak kandung korban, Sutrisno (65), tak terima kematian adiknya dan menduga tidak wajar. Hal tersebut dilansir dari Surat Kabar Surya Malang pada tahun 2016.

2. Macam-macam Visum et Repertum (VeR)

Ada beberapa jenis visum et repertum, yaitu:

1. Visum et repertum korban hidup

(a). Visum et repertum

Visum et repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

(b). Visum et repertum sementara

Visum et repertum sementara diberikan apabila setelah diperiksa korban perlu dirawat atau diobservasi. Karena korban belum sembuh, visum et repertum sementara tidak memuat kualifikasi luka.

(c). Visum et repertum lanjutan

Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah dirawat atau observasi korban sembuh, korban belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

2. Visum et repertum untuk orang mati (jenazah)

(a). Visum et repertum tempat kejadian perkara (TKP)

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

(b). Visum et repertum penggalian jenazah

Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.

(c). Visum et repertum psikiatri

Visum ini dilakukan pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

(d). Visum et repertum barang bukti

Misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.

3. Yang Berhak Meminta Visum et Repertum

Yang berhak meminta visum et repertum antara lain:

a. Penyidik

Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan untuk pejabat kepolisian negara berpangkat serendah-rendahnya Inspektur Dua Polisi, sedangkan

pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah Brigadir Dua Polisi.

b. Hakim Pidana

Hakim pidana biasanya tidak langsung minta visum et repertum pada dokter, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan dengan visum et repertum. Kemudian jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik.

4. Kedudukan Visum et Repertum (VeR)

Visum et repertum berkedudukan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

Sebagaimana diketahui bahwa alat-alat pembuktian didalam pidana sudah diatur dalam pasal 184 ayat 1 Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) yang menyebutkan adanya beberapa alat-alat bukti yang sah, antara lain:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa.

Ad. a. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Ad. b. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Penjelasan pasal 186 KUHAP menguraikan:

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut

umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.⁹

Ad. c. *Surat*

Pengertian surat telah diuraikan dalam pasal 187 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut padaa Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapanny, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ad. d. *Petunjuk*

Pengertian petunjuk telah diuraikan dalam pasal 188 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

- (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 186 Tentang Penjelasan Keterangan Ahli

dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

(3). Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Ad. e. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa telah diuraikan dalam pasal 189 KUHAP, yaitu sebagai berikut:

(1). keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2). keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3). Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

5. Visum Terhadap Mayat/Jenazah

Visum terhadap mayat/jenazah adalah pemeriksaan terhadap mayat yang sudah meninggal atau sudah dikuburkan dari dalam kuburannya yang telah disahkan oleh hukum untuk membuat peradilan.¹⁰ Pada umumnya, hal ini dilakukan kembali karena adanya kecurigaan bahwa mayat mati secara tidak wajar, adanya laporan yang terlambat terhadap terjadinya pembunuhan yang disampaikan kepada penyidik atau adanya anggapan bahwa pemeriksaan mayat yang telah dilakukan sebelumnya tidak akurat.

Pada aspek hukum, identifikasi kuburan harus dilakukan dengan perencanaan dan dicatat segala sesuatunya atas ijin petugas pemakaman dan pihak yang berwenang. Prosedur penggalian mayat diatur dalam KUHAP dan memerlukan surat permintaan pemeriksaan dari penyidik. Di samping itu, masih diperlukan persiapan lain yaitu koordinasi dengan pihak pemerintah daerah (Dinas Pemakaman), untuk

¹⁰ A. Amir. 2007. *Rangkaian IKF*. Ed. Kedua. Bagian Ked. Forensik dan Medikolegal. Fak. Kedokteran USU.

memperoleh bantuan penyediaan tenaga para penggali kubur, juga perlu dipersiapkan kantong plastik besar untuk jenazah serta kantong plastik untuk wadah/sampel pemeriksaan laboratorium.

Pasal 135 KUHAP berbunyi:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat 2 dan pasal 134 ayat 1 undang-undang ini”.

Dalam penjelasan pasal 135 KUHAP ini lebih lanjut disebut: yang dimaksud dengan “penggalian jenazah” termasuk penggalian mayat dari semua jenis tempat dan penguburan.

Pasal 133 ayat 2 KUHAP

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Pasal 134 KUHAP

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”.

6. Kendala Visum oleh Kedokteran Forensik

Pada dasarnya setiap dokter yang bekerja di Indonesia dapat dimintakan bantuan untuk membuat visum baik untuk orang hidup maupun untuk jenazah. Umumnya pembuatan visum jenazah dilakukan oleh dokter rumah sakit Pemerintah. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya pelayanan kepada masyarakat dimana semakin banyak pula muncul rumah sakit-rumah sakit baru di samping rumah sakit swasta, rumah sakit Pertamina, rumah sakit TNI dan lain-lain, terlihat pula adanya kecenderungan visum dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit diatas. Pada saat ini sebagian visum orang hidup telah banyak diterbitkan oleh rumah sakit-rumah sakit yang dikemukakan di atas, dan begitu pula telah ada visum jenazah yang diterbitkan oleh sebagian rumah sakit tersebut biarpun visum jenazah yang diterbitkannya tidak berdasarkan pemeriksaan yang lengkap melalui bedah mayat (otopsi). Pastiya semua orang memahami bahwa tidak mudah melakukan bedah mayat untuk visum jenazah dan bnyak hambatan yang harus diatasi.

Yang menjadi kendal bagi dokter forensik dalam pembuatan visum pada tindak pidana pembunuhan adalah.

- Keadaan jenazah yang sudah membusuk.

Keadaan jenazah yang sudah membusuk akan mengakibatkan pemeriksaan yang akan diambil oleh dokter tidak mendukung. Sehingga dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan menjadi negatif atau tidak dapat ditemukannya penyebab kematian. Dan jika jenazah

sudah membusuk dan hancur maka dokter juga akan kesulitan untuk menentukan jenis senjata yang dipakai pelaku dan perkiraan lebar maksimal senjata tajam yang masuk pada tubuh korban.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pengertian penyidik menurut ketentuan umum dalam KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 butir 1 KUHAP).

Pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Istilah dan pengertian secara grametikal, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.¹¹

Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidiki atau mengamati-amati;

2. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Cet. Kedua Penerbit: Balai Pustaka. Hal. 837

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi, dan sebagai penyidik pembantu berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Penata Muda (Golongan III/a) atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai wewenang penyidik diatur dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mulai dilakukannya penyidikan suatu perkara pada tindak pidana oleh penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan

diserhkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma

hukum yang berupa sanksi agar dapat dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikanciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Sehubungan dengan hal itu Moeljatno mengatakan. Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹² Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 72

Vos merumuskan bahwa suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang-undangan. Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.

J. E Jonkers, ia juga memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua pengertian, yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Van Schravendijk, merumuskan sebagai perbuatan yang boleh dihukum yang kemudian diartikan sebagai: “Suatu kelakuan orang begitu bertentangan dengan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman asal dilakukan oleh orang yang karena itu dapat dipersalahkan.”¹³

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi.

2. Bentuk Tindak Pidana

¹³ Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 23

Tindak pidana mempunyai 2 sifat, yaitu:

1. Formil

Tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU adalah suatu tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana). Contoh:

- a. Pencuri yang termaktub dalam pasal 362 KUHP, dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud yaitu “mengambil barang milik orang lain” tanpa disebutkan akibat yang ditimbulkan.
- b. Memalsukan surat yang termaktub dalam pasal 263 KUHP, dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud membuat surat palsu tanpa disebutkan akibat yang ditimbulkan.

2. Materiil

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UU adalah suatu tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud daripada perbuatan tersebut. (dengan timbulnya suatu akibat, maka tindak pidana terlaksana). Contoh:

- a. Pembunuhan, dalam pasal 338 KUHP dirumuskan dengan perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain tanpa disebutkan wujud dari perbuatan tersebut.

- b. Pembakaran rumah dengan sengaja dalam pasal 187 KUHP disebutkan sebagai mengakibatkan terjadinya kebakaran tanpa disebutkan wujud daripada perbuatan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berkaitan dengan meninggalnya orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.¹⁴

¹⁴ Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 55

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu¹⁵:

1. Atas dasar unsur kesalahan, dibagi dalam 2 kelompok terhadap nyawa, ialah:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 s/d 350.
 - b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).
2. Atas dasar obyeknya (nyawa), dibedakan dalam 3 macam:
 - a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, dan 345.
 - b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, dan 343.
 - c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal: 346, 347, 348, dan 349.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari¹⁶:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 56.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
3. Pembunuhan berencana (340).
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343).
5. Pembunuhan atas permintaan korban (344).
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).

2. Unsur-unsur Yang Terdapat Didalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Mengenai unsur-unsur pembunuhan dalam bentuk pokok, dapat dilihat dari rumusan pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut¹⁷:

- a. Unsur obyektif:
 - Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - Obyek: nyawa orang lain
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja

Ad. a. *Menghilangkan nyawa*

¹⁷ *Ibid.*

Dalam tindak pidana pembunuhan tidak dirumuskan perbuatannya, tapi hanya akibat dari perbuatan yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dari perkataan/unsur “menghilangkan nyawa” dapat diartikan bahwa perbuatan itu dapat terjadi secara sempurna, bukan dilihat dari bagaimana wujud nyata perbuatan itu, melainkan dilihat dari apakah perbuatan itu telah menimbulkan akibat kematian orang lain atau tidak. Bila wujud perbuatan telah ada, tetapi akibat hilangnya nyawa orang lain belum terjadi, maka pembunuhan belum terjadi, yang terjadi adalah percobaan pembunuhan.

Bagi perbuatan menghilangkan nyawa mengenai bagaimana wujud konkrit perbuatan aktif tidaklah penting, yang penting adalah dari perbuatan itu ada akibat hilangnya nyawa orang lain. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidak harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian yang penting akibat itu harus benar-benar disebabkan oleh perbuatannya. Jadi harus ada suatu perbuatan walaupun kecil untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa seseorang.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat tiga syarat yang harus dibuktikan, yaitu¹⁸:

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 57.

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat suatu kematian orang lain.
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Antara unsur subyektif (sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan) terdapat syarat yang juga harus dibuktikan ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Ad. b. Dengan sengaja

Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam KUHP tidak dirumuskan pengertian kesengajaan. Dalam *Memorie Van Toelichting* terdapat suatu penjelasan yang dimaksud sengaja adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu.¹⁹

Undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur opzet (kesengajaan pada diri para pelakunya), artinya para pelaku harus mempunyai opzet yang ditujukan pada akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang, dengan kata lain mereka itu

¹⁹ Musruchin Ruba'i. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FHUB. Hal. 50

harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang terlarang/tidak dikehendaki oleh undang-undang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan. Timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja/bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud/tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Sikap batin petindak yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang ia kehendaki dapat berwujud dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Artinya menghendaki (*willens*) untuk memujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

b. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.

c. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu.

